

Pemberdayaan Masyarakat Menuju Ke mandirian Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

Rina Tresnawati¹, Evi Octavia², Shinta Dewi Herawati³, Dini Verdania Latif⁴, Syakieb Arsalan⁵, Niki Hadian⁶, Mochamad Kohar Mudzakar⁷

¹Akuntansi D3, Universitas Widyatama
e-mail: rina.tresnawati@widyatama.ac.id

²Akuntansi D3, Universitas Widyatama
e-mail: evi.octavia@widyatama.ac.id

³Akuntansi S1, Universitas Widyatama
e-mail: shinta.dewi@widyatama.ac.id

⁴Akuntansi S1, Universitas Widyatama
e-mail: dini.verdania@widyatama.ac.id

⁵Akuntansi S1, Universitas Widyatama
e-mail: syakieb.arsalan@widyatama.ac.id

⁶Akuntansi S1, Universitas Widyatama
e-mail: niki.hadian@widyatama.ac.id

⁷Akuntansi S1, Universitas Widyatama
e-mail: kohar.mudzakar@widyatama.ac.id

Article History:

Received: 8 November 2021

Revised: 29 November 2021

Accepted: 6 Desember 2021

Abstract: *Pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab atas perbaikan kehidupan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan. Perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Kewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan yang tertuang pada Undang Nomor 20 Tahun 2003 20 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Kami terpenggil mensosialisasikan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi pada masyarakat yang berada di lingkungan Dinas Sosial Cianjur agar masyarakat paham mengenai*

Keywords:

Pemberdayaan masyarakat, kemandirian keluarga

harga pokok akan meningkatkan kesejahteraannya. Program-program Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari ; Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi , Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan , dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.

Correspondence author: Rina Tresnawati; rina.tresnawati@widyatama.ac.id; Bandung; Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan visi Cianjur maju dan agamis dan mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dengan kerangka pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang lebih baik dan menciptakan pemerintah yang bersih, yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup spiritual dan sosial masyarakat sesuai misi ke 2 Cianjur yaitu meningkatkan pembangunan keagamaan dengan sasaran menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun ruang lingkup kewenangannya meliputi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial dalam menangani permasalahan PMKS dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut maka pemerintah perlu melakukan suatu perencanaan yang bersifat sistematis dan komperhensif sehingga penanganan masalah-masalah tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cianjur serta memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

Arah pertimbangan dan tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, hasil-hasil yang dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategi yang berkembang maka pernyataan Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah “Cianjur Lebih Maju dan Agamis“. Secara filosofis visi tersebut dimaknai sebagai berikut: Cianjur Lebih Maju adalah pembangunan akan terus meningkat dengan semangat kemandirian, inovasi dan profesionalitas dalam pembangunan semua bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat. Agamis adalah pembangunan manusia yang berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan berbagai bidang.

Masyarakat di daerah yang akan Tim Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat kunjungi merupakan pengusaha kecil yang banyak bergerak di bidang usaha

warung makan, toko kelontong dan lain-lain. Adapun kondisi para pelaku usaha di Kabupaten Cianjur tersebut masih banyak yang belum dapat menghitung harga pokok secara tepat. Mereka menentuka dan harga pokoknya masih sangat sederhana, sehingga sering terjadi kerugian atas penjualannya. Dari kondisi tersebut maka kami dari Cluster Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Utama sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan daerahnya maka perlu memberikan pengabdian kepada masyarakat khususnya Pendamping usaha di Kabupaten Cianjur, berkomunikasi dengan Dinas Sosial terkait dengan perhitungan harga pokok.

Sesuai dengan analisis situasi di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Kurangnya pengetahuan endamping usaha tentang Akuntansi.
2. Pemahaman pendamping usaha tentang Perhitungan Harga pokok

Mengacu pada masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan akuntansi, perhitungan harga pokok, pelaporan keuangan bagi usaha di Kabupaten Cianjur.

Tujuan kegiatan

1. Para pendamping usaha di Kabupaten Cianjur memahami tentang pencatatan akuntansi dan laporan keuangan.
2. Para Pendamping usaha di Kabupaten Cianjur dapat menyadari arti pentingnya perhitungan harga pokok.
3. Memenuhi beban tugas dosen sebagaimana mestinya Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Permenristek 20 Tahun 2017.

Kelayakan bagi perguruan tinggi adalah

1. Untuk memenuhi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan tinggi. model pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat
2. Kualitas dan kapabilitas pengabdian kepada masyarakat sehingga tepat sasaran bagi para peserta dalam mengelola usaha dan pencatatan akuntansi menurut prinsip-prinsip yang berlaku.
3. Memberikan berdasarkan solusi kajian atas kebutuhan, tantangan atau masalah yang dihadapi Pendamping Usaha dalam pencatatan, perhitungan dan pertanggungjawaban kegiatan usaha dalam bentuk laporan keuangan.
4. Memenuhi beban tugas dosen sebagaimana mestinya Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Permenristek 20 Tahun 2017.

Perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi berkewajiban melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan yang tertua pada Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 20 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Kami terpenggil mensosialisasikan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi pada Masyarakat yang berada di lingkungan Dinas Sosial Cianjur agar masyarakat paham mengenai harga pokok akan meningkatkan kesejahtraannya.

SASTRA KAJIAN

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab atas perbaikan kehidupan. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat. Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut kemandirian kemandirian, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan untuk memutuskan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan daya/yang dimiliki. Sedangkan menurut Ife (1995), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah.

Kindervatter (1979) memberikan batasan yang lebih pada produk akhir dari proses pemberdayaan, yaitu anggota masyarakat memperoleh pemahaman dan mampu mengontrol sumber daya sosial, ekonomi dan politik agar dapat meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan inti dari pemberdayaan masyarakat adalah pemunculan daya atau kekuatan dalam diri masyarakat rendah yang semula tidak mampu menjadi mampu, yang semula aktif dan yang semula tidak berdaya menjadi berdaya. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya

Pemberdayaan dalam arti luas merupakan suatu tindakan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional agar secara perorangan dan atau kelompok masyarakat mandiri. Pemberdayaan masyarakat memiliki kaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan di mana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama yang akan membawa menuju terwujudnya ekonomi dan sosial yang dinamis, serta menuju kemandirian.

Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses dan bentuk pemberdayaan yang dapat menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam sebuah kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian akan diperoleh kemampuan dari waktu dan akan terakumulasinya kemampuan yang memadai, untuk membebaskan kemandirian mereka. Apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan suatu visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat

Mut'adin (2002) menyatakan bahwa kemandirian adalah suatu sikap yang diperoleh dari pengembangan diri, individu akan terus belajar untuk mandiri dalam menghadapi berbagai situasi lingkungan sehingga akhirnya akan mampu bertindak sendiri dengan mandirinya seseorang memilih jalan hidupnya untuk hidup dapat berkembang dengan lebih mantap. Dalam konsep ini program-program pembangunan dan pemberdayaan dirancang secara sistematis agar individu atau masyarakat menjadi subjek dari pemberdayaan tersebut.

Nilai-nilai kemandirian yang dimiliki individu akan menjadi sempurna apabila didukung oleh sifat-sifat kemandirian yang meliputi : mandiri psikososial, kultural dan ekonomi, Prakarsa dan wirausaha, kepemimpinan dan orientasi dalam persaingan. Perilaku mandiri merupakan fundamen dasar seseorang dalam meningkatkan kualitas kerja dalam pekerjaannya.

Ada tiga aspek kemandirian yang dikemukakan oleh Stienberg (1999) yaitu kemandirian, kemandirian dan kemandirian nilai. Perilaku kemandirian merupakan kemampuan individu dalam menentukan pilihan atau keputusan untuk mengelola dirinya sendiri. Ada tiga domain kemandirian perilaku yaitu memiliki kemampuan mengambil keputusan yang disadari oleh adanya gangguan dari tingkah lakunya, memilih alternatif pemecahan masalah berdasarkan pertimbangan sendiri dan orang lain, bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, memiliki kekuatan terhadap pengaruh pihak lain yang ditentukan oleh mudahnya mempengaruhi tekanan teman sebaya dan orangtua dalam mengambil keputusan.

METODE PELAKSANAAN

Sasaran kegiatan ini adalah Pendamping usaha di Kabupaten Cianjur yang bergerak di bidang usaha kecil. Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya Dinas Sosial Cianjur untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian masyarakat. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Pelatihan para Pendamping Usaha yang tergabung dalam Dinas Sosial di Kabupaten Cianjur untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di atas maka berbagai tindakan meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Ceramah materi pelatihan.
2. Diskusi terkait dengan permasalahan harga pokok yang ada di lapangan.
3. Pelatihan dan praktik.

Peserta diberi kesempatan untuk mencoba membuat perhitungan harga pokok dan pencatatan keuangan. pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahap, tahap pertama merupakan tahap persiapan. Tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi yaitu evaluasi atas hasil yang dicapai oleh para peserta pelatihan. Indikator ketercapaian tujuan pengabdian ini adalah lebih dari 80% peserta yang dapat memahami tentang pengertian akuntansi dan arti pentingnya biaya/harga pokok bagi Pendamping usaha di Kabupaten Cianjur.

Pembicara memberikan materi secara fleksibel dengan pendekatan kasus-kasus yang dihadapi para peserta dan memberikan alokasi waktu yang lebih banyak untuk

tanya jawab. Materi diusahakan mendekati kenyataan yang dihadapi oleh para peserta sebagai pendamping usaha dalam hal perhitungan harga pokok dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak akuntansi seperti Accurate, Myob, dan lain sebagainya yang sama dengan Pemerintahan Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk PkM yang diusulkan diadakan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Cianjur.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan. Program-program Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari; Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Sedangkan Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

Perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Kewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan yang tertuang pada Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi pasal 45

menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini memiliki manfaat yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pendamping usaha di Kabupaten Cianjur tentang perhitungan harga pokok, memberikan kesadaran tentang arti pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan, meningkatkan kemampuan bagi pendamping usaha di Kabupaten Cianjur tentang pelaksanaan administrasi dalam menjalankan usaha, memberikan kemampuan kepada peserta tentang cara pencatatan kegiatan agar tidak dapat dikendalikan dan dapat dipermudah, meningkatkan kemampuan Pendamping usaha dalam mengembangkan usaha mitranya sehingga membantu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kemampuan dosen dalam merealisasikan Pengabdian kepada Masyarakat, meningkatkan profesionalisme dosen dalam mengimplementasikan dan menerapkan kompetensi yang memenuhi, memenuhi dan melaksanakan Renstra Universitas Widyatama, memenuhi beban tugas Dosen sebagaimana sebagaimana Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Permenristek 20 Tahun 2017.

Sementara itu, manfaat yang dapat dirasakan peserta adalah mendapat pengetahuan secara teori dan praktik dalam perhitungan harga pokok. Selain itu pendampingan mendapatkan pemahaman akan pentingnya memiliki ilmu akuntansi dan bagaimana proses penghitungan harga pokok produksi hingga harga jual yang mencukupi. Pendamping Usaha dan para mitra menyadari pentingnya akuntansi dalam dunia usaha sebagai bentuk dan tanggung jawab untuk meningkatkan usaha mitra binaannya. Hal ini mendorong kesadaran bahwa pentingnya peran akuntansi untuk membantu tercapainya keuntungan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Program-program Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini memiliki beberapa manfaat baik bagi peserta dan pendampingan usaha. Manfaat bagi peserta salah satunya adalah mendapatkan secara teori dan praktik dalam hal harga pokok, memberikan kemampuan kepada peserta tentang cara pencatatan kegiatan agar dapat terkendali dan dapat dikendalikan, serta manfaat bagi usaha yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perhitungan pokok, memberikan kesadaran tentang arti pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan, meningkatkan kemampuan untuk pendampingan usaha di Kabupaten Cianjur tentang administrasi dalam menjalankan usaha.

Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses dan bentuk pemberdayaan yang dapat menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam sebuah kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian akan diperoleh kemampuan dari waktu dan akan terakumulasinya kemampuan yang memadai, untuk membebaskan kemandirian mereka. Apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan suatu visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang mandiri.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kegiatan pelatihan ini melibatkan banyak pihak yang terkait. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Widyatama, terutama kepada para pimpinan yang telah berkenan melakukan kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, Pengembangan Serta Pengabdian Kepada Masyarakat atas dana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tahun pelaksanaan Semester Ganjil 2021/2022 dengan Nomor Kontrak 013/SPC2/LP2M-UTAMA/XI/2021 sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dan berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Donald E. Kieso , Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. (2012). Akuntansi Menengah : Edisi IFRS. *Amazon.com*
- Ife, J. (2006). Pengembangan Masyarakat: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (diterjemahkan oleh Sastrawan Manulang dkk). *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Kindervatter, S. (1979). Pendidikan Nonformal Sebagai Proses Pemberdayaan Dengan Studi Kasus Dari Indonesia dan Thailand. *AS dari Amerika: Pusat Pendidikan Internasional*.
- Mu'tadin, Z. (2002). Kemandirian sebagai Kebutuhan Psikologis Bagi Remaja. [online] Tersedia: http://www.daffodilmuslimah.multiply.com/journal/item/162/Kemandirian_sebagai_Kebutuhan_Psikologis_Pada_Remaja. [akses: 20 Februari 2015].
- Sulistiyani A, Teguh. (2004). Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. *Yogyakarta: Gava Media*.
- Shomedran. (2016). Pemberdayaan Partisipatif Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi dan Perilaku Warga (Studi Pada Bank Sampah Warga Manglayang Rt 01 Rw 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Bandung). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/issue/view/416>.
- William. K. Carter. 2015. Akuntansi Biaya . *Cengage Belajar*